

Peran Dinas Pariwisata DIY dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

Niken Setyawati ^{1*}, Yuli Setyowati²

Afiliasi: ^{1,2}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Korespondensi Penulis: ^{1*} galihpambudi17@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam suatu pembangunan wilayah. Dengan adanya berbagai kegiatan pariwisata maka daerah-daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata akan lebih berkembang dan maju, di beberapa daerah dapat memberikan dampak yang positif dalam perekonomian terutama dalam pemasukan devisa. Pembangunan kepariwisataan di DIY dinilai telah muncul, meski pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak mudah lantaran belum semua lapisan masyarakat memahami pentingnya pariwisata, pembangunan kepariwisataan berkelanjutan sangat tergantung pada seberapa besar peran pemerintah daerah dan juga didukung oleh partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan ini dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi atau pengamatan terhadap arsip-arsip yang dihasilkan dari kegiatan Dinas Pariwisata DIY berupa laporan kegiatan, hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY LAKIP, RENSTRA, makalah dan power point yang digunakan oleh Pejabat eselon ketika menjalankan tugasnya sebagai narasumber, dan juga pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat eselon IV dan III melalui aplikasi SENGGUH yang dimiliki oleh BAPPEDA DIY. Dalam melakukan observasi dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan yang dibutuhkan di Unit kearsipan, Subbag Program, Seksi dan Bidang di lingkungan Dinas Pariwisata DIY. Dilakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Penelitian ini menemukan beberapa hal penting. Pertama, Dinas Pariwisata DIY terus berkomitmen untuk melakukan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan berbasis pada community based tourism Kedua, Dinas Pariwisata DIY telah melakukan perannya sebagai organisasi publik yang diberi tugas untuk melakukan perannya yaitu koordinasi, perencanaan (planning), Undang-undang (legislation dan regulation), Peran Sebagai Pengusaha (enterprenuer), Stimulasi (stimulation), Peran sebagai Pariwisata Sosial (Social tourism), Peran Sebagai daya tarik (Public interest).

Kata kunci: Peran Pemerintah; Pembangunan Berkelanjutan; Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

Tourism development has a very important role in regional development. With the existence of various tourism activities, areas that have basic tourism potential will be more developed and developed, in some areas can have a positive impact on the economy, especially in foreign exchange earnings. Tourism development in DIY is considered to have emerged, although sustainable tourism development is not easy because not all levels of society understand the importance of tourism, sustainable tourism development is highly dependent on how big the role of the regional government is and is also supported by community participation in supporting this activity in the context of implementing development. This qualitative research uses data collection techniques using the methods of observation, documentation and interviews. In conducting observations or observations of the archives generated from the activities of the DIY Tourism Office in the form of activity reports, the results of studies carried out by the DIY LAKIP Tourism Office, RENSTRA, papers and power points used by echelon officials when carrying out their duties as resource persons, and also reporting of activities carried out by echelon IV and III officials through the SENGGUH application which is owned by BAPPEDA DIY. Observations are carried out by looking for materials needed in the Archives Unit, Program Subdivision, Section and

Field within the DIY Pariwisata Service. Interviews were conducted with informants with a list of questions that had been prepared in advance. This research found several important things. First, the DIY Tourism Office continues to be committed to carrying out sustainable tourism development based on community based tourism. Second, the DIY Tourism Office has carried out its role as a public organization tasked with carrying out its roles, namely coordination, planning (planning), laws (legislation and regulation), Role as Entrepreneur, Stimulation, Role as Social Tourism (Social tourism), Role as attraction (Public interest).

Keywords: *Role of Government, Sustainable Development, Community Participation.*

Informasi Artikel: Submit: 24-2-2021 Revisi: 12-03-2022 Diterima: 12-4-2022



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai suatu bangsa yang mengikat diri di dalam bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan pembangunan perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinaminator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional di mulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa-kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, propinsi, sampai nasional, dan tingkat global-internasional pembangunan antarnegara bangsa.

Sesungguhnya Pancasila dan UUD 45 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan

dampaknya untuk rakyat. Dalam tahap dan pemahaman ini disebut : (1) secara politik demokrasi telah berjalan, (2) secara sosial terjadi peranserta aktif masyarakat, (3) secara ekonomi, mekanisme pasar berperan (*market work mechanism*), (4) secara hukum berjalan sesuai hukum dan peraturan (*law and order*) (www.bappenas.go.id).

Kelembagaan penyelenggaraan negara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan negara dan mengorganisasikan tugas–tugas pembangunan. Dalam rangka pengorganisasian tugas–tugas pembangunan sesungguhnya peran pemerintah adalah membantu pelaksanaan pembangunan dengan peran pemerintah adalah membantu pelaksanaan pembangunan dengan peran utama (1) membantu mengelola potensi nasional dan global sebagai sumber pembangunan nasional, (2) membantu merumuskan alokasi sumberdaya untuk penyelenggaraan pembangunan nasional, dan (3) mendampingi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan nasional (www.bappenas.go.id).

Pembangunan selalu erat kaitannya dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, sehingga untuk mengoptimalkan pembangunan nasional perlu dilakukan upaya-upaya guna memacu sektor –sektor yang dianggap potensial dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian termasuk diantaranya sektor pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian dari pembangunan nasional dan terkait dengan pembangunan sektor – sektor lainnya. Oleh karena itu keberhasilan pariwisata turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam mencapai sasaran Program Pembangunan Nasional, maka sektor pariwisata yang merupakan bagian kebijakan di bidang ekonomi. Dari aspek ekonomi, pariwisata diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat dan devisa bagi negara, sedangkan dari aspek social diharapkan dapat melonggarkan himpitan beban ketenagakerjaan. Dan dari aspek politiknya, diharapkan dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, dan dari aspek budaya dapat berperan dalam meningkatkan pengenalan apresiasi, pelestarian, dan pengembangan seni budaya Indonesia. Indonesia merupakan daerah tujuan wisata yang sangat potensial untuk dikerjakan. Indonesia memiliki beranekaragam budaya, adat istiadat, dan keindahan alam yang tidak dimiliki negara lain. Keberagaman budaya dan keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara mengenal budaya Indonesia sangat beragam dan masyarakat Indonesia yang terkenal ramah–ramah, sehingga wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung ke Indonesia.

Pembangunan pariwisata memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan suatu wilayah. Dengan adanya berbagai kegiatan pariwisata, maka daerah-daerah yang memiliki

potensi dasar pariwisata akan lebih berkembang dan maju, selain pariwisata di beberapa dapat memberikan dampak yang positif dalam perekonomian, terutama pemasukan devisa.

Ada suatu prinsip penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang NO. 10 tahun 2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan, yang semuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan potensi kekayaan alam dan warisan budaya yang terus dikembangkan sebagai tujuan wisata favorit baik didalam negeri maupun luar negeri. Yogyakarta selalu ramai di setiap musim liburan penuh dengan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Sesuai dengan visinya bahwa pembangunan pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada pengembangan kepariwisataan berkelanjutan yang berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara, dan berkelas dunia. Dengan melalui Dinas Pariwisata DIY, Yogyakarta terus mengembangkan potensi wisata dengan dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata DIY (RIPPDA) yang telah ditetapkan dengan Perda No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi DIY Tahun 2012 – 2025.

Sebagai salah satu tujuan wisata terkemuka di Indonesia, Yogyakarta menyimpan banyak sekali potensi wisata baik wisata alam maupun wisata budaya yang unik dimana didalamnya terkandung nilai-nilai luhur budaya bangsa kearifan lokal yang dapat menunjang kegiatan pariwisata berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konveksi, wisata belanja. Pengembangan pariwisata berkelanjutan di DIY dinilai telah muncul, meski begitu pengembangan pariwisata berkelanjutan tidak mudah lantaran belum semua lapisan masyarakat memahami pentingnya pariwisata. Pariwisata berkelanjutan menurut UNESCO diartikan sebagai kegiatan pariwisata yang menghormati masyarakat lokal, para wisatawan, warisan budaya serta lingkungan Hal tersebut juga ditekankan Menteri Pariwisata (pada waktu itu) Arief Yahya saat ini, bagaimana mengembangkan pariwisata diiringi kesadaran masyarakat melestarikan obyek wisata. Wisata berkelanjutan sangat tergantung pada seberapa besar peran masyarakat dan manfaat bagi masyarakat DIY dengan segala kekayaannya dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri merupakan bentuk upaya

pengembangan wisata berkelanjutan. Pelestarian alam berdasarkan pada *community base tourism* merupakan salah satu contoh konkret mengenai pariwisata berkelanjutan. Dimana masyarakat dengan sadar ikut memahami dan melakukan upaya pelestarian yang pada akhirnya alam akan terjaga dengan baik, budaya terjaga, dan kesejahteraan rakyat meningkat (harianjogja.com, 26 Maret 2019).

Sekarang ini banyak destinasi wisata yang dikembangkan oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah hadir sebagai pengontrol agar perkembangannya, tatanannya sesuai dengan aturan. Penerapan pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) tidaklah mudah karena belum semua masyarakat memahami arti pentingnya pariwisata. Masih terjadinya kepentingan-kepentingan sesaat memenuhi kebutuhan hidup saat ini

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi pembangunan yaitu menjadi destinasi wisata terkemuka di Asia Tenggara yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025, dan saat ini pemerintah daerah DIY tengah memperbaiki dan meningkatkan kualitas pariwisata secara bertahap dan berkomitmen untuk membangun destinasi wisata dengan prinsip *sustainable development*. Prinsip ini sesuai dengan filosofi *hamemayu hayuning bawono* yang berarti mempercantik alam yang sudah cantik dan hal ini telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah DIY bahwa Hamemayu Hayuning Bawono sebagai salah satu dasar utama agar pengembangan wisata tetap berkelanjutan dan menjaga ekosistem.

Kekuatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pada kearifan lokalnya. Nilai kearifan lokal sangat banyak dan menarik. Untuk itu, Dinas Pariwisata DIY dalam melakukan pembangunan kepariwisataan berpijak pada kearifan lokal tersebut, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki dan merasakan pentingnya pariwisata dalam rangka menumbuhkan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan. Selain itu pembangunan pariwisata saat ini memang diarahkan kepada pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan yang terarah pada penggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya manusia. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak obyek wisata baik wisata alam maupun budaya, dan pengembangan pariwisata di DIY sangatlah penting untuk kemajuan daerah karena juga merupakan penyumbang PAD terbesar setelah sektor lainnya, yaitu sektor konstruksi, pertanian, pengangkutan dan komunikasi. Karena DIY itu juga dua kekuatan potensi wisata yaitu wisata alam dan budaya yang mempunyai keunikan tersendiri, maka pembangunan kepariwisataan harus dilaksanakan secara

berkelanjutan agar penyelenggaraan kepariwisataan tidak merusak lingkungan, dan juga di DIY mempunyai kearifan dan budaya lokal yang mendukung adanya kelestarian lingkungan.

Kebijakan Pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata sangat penting perannya dalam menunjang keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Perkembangan dan pertumbuhan pariwisata perlu diantisipasi agar perkembangannya tetap pada jalurnya dan daya dukungnya. Peraturan otonomi daerah memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengelola sumber daya yang ada pada daerah masing-masing, misalnya pengembangan sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Tentu saja ini tidak lepas dari peranan pemerintah daerah penerapan peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun peranan pemerintah daerah sebagai upaya memperkuat peranan pemerintah dalam pembangunan pariwisata adalah perencanaan pembangunan dalam hal ini dalam konteks pembangunan pariwisata ini merupakan pondasi awal dalam mengambil peran yang penting dan strategis, Pemerintah daerah merupakan stakeholder yang memiliki peranan yang paling besar terhadap kemajuan sektor pariwisata yang berdampak pada pendapatan daerah. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah Mendiskripsikan Peran Dinas Pariwisata DIY dalam implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan dilihat dari berbagai aspek yaitu peran koordinator, peran perencanaan, peran pembuat kebijakan atau undang-undang, sebagai pengusaha, peran sebagai stimulasi, peran sebagai pariwisata sosial, peran sebagai daya tarik publik.

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jawabannya secara ilmiah. Di dalam melakukan suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang sesuai dan berhubungan dengan inti permasalahan yang akan diteliti. Menurut Moleong (2001: 6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, untuk itu peneliti dibatasi hanya mengungkapkan fakta-fakta yang tidak menggunakan hipotesa. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. Obyek Penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi obyek peneliian adalah Peran Dinas Pariwisata DIY Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Parwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan, Subyek Penelitian adalah pejabat eselon di lingkungan Dinas

Pariwisata DIY, lokasi penelitian mengambil lokasi di Dinas Pariwisata DIY, dengan alasan pemilihan lokasi adalah Dinas Pariwisata DIY merupakan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pariwisata, terlebih sejak di undangkannya Undang-Undang Keistimewaan DIY maka sektor pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan di DIY dan merupakan penyumbang PAD terbanyak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang terkemuka yang sudah dikenal baik tingkat nasional maupun dunia setelah Bali, memiliki banyak potensi wisata berupa keindahan alam, budaya dan kearifan lokal yang layak menjadi potensi wisata yang berdaya saing. Dinas Pariwisata DIY merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah yang bertugas mengurus kepariwisataan di DIY. Dinas Pariwisata DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata DIY memiliki tugas untuk melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya. Pembangunan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY sebagai unsur pelaksana di daerah yang khusus bertugas dalam melaksanakan pembangunan pariwisata. Peran Dinas Pariwisata DIY dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berdasarkan Paradigma Pembangunan Berkelanjutan, dengan menekankan pada teori peran pemerintah daerah yaitu:

Peran Koordinasi

Koordinasi sangat penting dalam suatu organisasi baik organisasi public maupun organisasi swasta, koordinasi dilakukan untuk menciptakan suatu usaha yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY melalui visi dan misinya memiliki tujuan untuk memajukan dan mengembangkan industri pariwisata yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat. Hal ini telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan melakukan koordinasi dengan antar bidang di Dinas Pariwisata DIY antar OPD dan Stekeholder, hal ini perlu dilakukan karena banyak sekali instansi yang memiliki kegiatan sejenis namun tidak terkoordinasi dengan baik. Masalah ini juga terjadi dalam hubungan antar unit dalam organisasi, beberapa unit dalam satu organisasi memiliki kegiatan serupa tanpa bisa dikendalikan oleh pimpinan. Dalam Proses

perencanaan terlebih dahulu dilaksanakan koordinasi antar bidang kemudian antar OPD dan stakeholder melalui forum OPD, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan kembali juga dilaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak baik itu OPD maupun dengan stekaholder pariwisata seperti lembaga-lembaga yang resmi sebagai pemberi sertifikasi, Perguruan Tinggi, Akademisi, Komunitas Pariwisata, Organisasi Kepariwisata seperti HPI, PHRI, GPI, Desa wisata dan lain-lain Dengan mereka ini Dinas Parwisata melakukan sinergitas dan koordinasi dalam pencapain program kerja dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata DIY juga mengembangkan adanya Kemitraan dengan komunitas pariwisata yatu berupa kegiatan FGD kemitraan desa wisata dan hotel, yang bertujuan untuk melakukan sinergitas, komitmen dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan stakeholder pariwisata sebagai wujud koordinasi dan ikhtiar dalam rangka mewujudkan Parwisata DIY terkemuka di Asia. Pengukuhan Forum Komunikasi Desa Wiisata ini dilanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Kepala DInas Pariwisata DIY, PHRI, GIPI, ASITA, dan Forkom Desa Wisata.

Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan juga dilakukan dengan DInas Pariwisata DIY dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota untuk mempresentasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Kabupaten/Kota, hal ini dilaksanakan agar terjadi harmonisasi dalam kegiatan dan tidak tumpahtindih melakukan kegiatan yang sama atau juga untuk saling berkolaborasi sehingga dapat menghemat anggaran. Peran Koordinasi dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY sebelum membuat perencanaan dan setiap kegiatan yang akan dimulainya kegiatan atau program kerja. Koordinasi ini dilakukan dengan Instansi terkait, stakeholder pariwisata, komunitas, praktisi dan staf ahli bidang pariwisata yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melalui SK Gubernur DIY, koordinasi ini dilaksanakan dengan melalui rapat-rapat dinas, forum komunikasi dan juga kunjungan lapangan. Selain itu juga dilaksanakan Forum Komunikasi OPD dalam proses perencanaan dengan memaparkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DInas Pariwisata kepada OPD dengan tujuan untuk mensinergikan program kegiatan, dengan harapan mungkin ada program kerja yang bisa dikerjasamakan dengan OPD lain. Sebagai contoh dalam pembuatan Renstra Dinas Parwisata DIY sebagai masa transisi dalam pembuatan RPJMD yang akan disinkronkan dengan RPJMD selanjutnya, dilakukan FGD dengan melibatkan berbagai pihak. Selain TAPD pemerintah Kabupaten/Kota, FGD ini juga menjaring masukan dari Stakeholder pariwisata. Dinas Pariwisata sering juga melakukan audiensi dengan stakeholder pariwisata dalam rangka

pembangunan pariwisata dalam rangka meningkatkan pemasaran pariwisata di DIY misalnya dengan ASITA DIY yang merupakan asosiasi perusahaan perjalanan wisata yang selalu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dalam memajukan promosi pariwisata dalam kegiatan table top dengan mempertemukan seller dan buyer event ini dapat bersifat nasional dan internasional, yang bersifat internasional yaitu event JITM (Joga International Travel Mart), pada kegiatan ini selanjutnya akan ada transaksi bisnis yang dilakukan, seperti misalnya akan mendatangkan wisatawan baik luar negeri dan dalam negeri, kegiatan ini terus dilakukan dengan bersinergi dan berkolaborasi dalam event-event yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, sehingga kegiatan ini akan mendatangkan nilai ekonomi bagi pelaku wisata, menghasilkan kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak seperti investor yang menanamkan modal di bidang pariwisata Dinas Pariwisata DIY berharap dengan adanya acara ini dapat mempromosikan pariwisata DIY dan memajukan perekonomian di sektor pariwisata. Dengan harapan acara ini sebagai jembatan untuk para seller dan buyer bertemu dan mereka dapat follow up dan melakukan transaksi.

Forum Desa Wisata dan Komunitas lainnya yang memberikan perhatian khusus pada pembangunan pariwisata dengan membantu melaksanakan promosi wisata melalui event-event yang rutin mereka laksanakan setiap tahunnya. Event budaya, olahraga, musik festival, dan lain sebagainya akan memberikan hiburan pada wisatawan yang hadir di Yogyakarta, sehingga dibutuhkan kolaborasi lintas instansi untuk peningkatan sektor pariwisata Yogyakarta diharapkan dapat menggeliatkan kembali ekonomi dari sektor pariwisata DIY untuk keberlangsungan perekonomian, keberlangsungan hidup dan kemampuan untuk bertahan melalui kegiatan pariwisata sehingga event ini diharapkan terus bergerak untuk memulihkan ekonomi dan pariwisata Yogyakarta dengan menerapkan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*).

Peran Sebagai Perencana

Pelaksanaan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY dimulai dengan kegiatan perencanaan. Perencanaan tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pariwisata DIY. Kegiatan ini dimulai dari pembuatan perencanaan Sekretariat, Bidang dan Seksi berdasarkan pagu kegiatan yang telah ditentukan, perencanaan kegiatan tersebut berdasarkan RIPPDA DIY. Dinas Pariwisata DIY melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan seperti pengelola Hotel, Pengelola Destinasi Wisata dan Pengelola Desa Wisata serta

komunitas pemerhati pariwisata. Forum ini biasanya juga dihadiri oleh anggota DPRD komisi terkait untuk memberi dorongan dan masukan bagi perencanaan kegiatan yang sudah dirancang, hasil dari Forum OPD ini menjadi bahan dalam membuat rancangan kerja (RENJA). Dalam membuat rencana kerja harus berdasarkan pada tupoksinya dan mengacu kepada kebijakan Nasional. Dinas Pariwisata DiY dalam menjalankan fungsi ini dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan. Yaitu mulai dari proses pembuatan rencana kegiatan dengan melakukan terlebih dahulu evaluasi secara internal di bidang-bidang untuk menentukan program kerja selanjutnya dan juga untuk mencari inovasi-inovasi baru dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY, kemudian perencanaan tersebut dikemas oleh masing-masing bidang dan seksi dengan pagu anggaran yang sudah ditentukan, tentu saja proses perencanaan ini mengacu kepada RIPPDA dan rencana strategis (renstra) Dinas Pariwisata DIY yang kemudian dituangkan kedalam rencana kerja (renja) setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan. Forum OPD dilaksanakan dalam rangka mensinkronkan dan mensinergikan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan instansi terkait, stakeholder dan komunitas pariwisata lainnya.

Setelah disusunnya RKPD dan Renja SKPD untuk tahun rencana berikutnya maka dimasukkan kedalam tahapan penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). yang akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPB ini selanjutnya dibahas dalam bersama antara eksekutif dan legislatif untuk bisa disahkan menjadi APBD. APBD ini yang menjadi dasar OPD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan direncanakan mendatang (tahun depan).

Tahapan-tahapan dalam rangka pembuatan perencanaan kegiatan pembangunan pariwisata DIY sudah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pariwisata DIY, hal ini dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pariwisata DIY yang lengkap dan runtut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yaitu Dokumen DPA yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu TAPD Pemda DIY dan sudah menjadi dokumen yang sah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Dinas Pariwisata DIY.

Peran Pembuat Kebijakan (Undang-Undang dan Peraturan)

Dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan tentu saja tidak terlepas dari kebijakan yang diambil, khususnya kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY. Dalam Pelaksanaan pembangunan kepariwisataan DIY, maka Dinas Pariwisata DIY telah

membuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025. RIPPDA ini merupakan penjabaran dan amanat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi. Dalam RIPPDA ini diatur tentang Pembangunan Kepariwisata Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah, indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah, Pengawasan dan Pengendalian. Singgih Raharjo, Kepala Dinas Pariwisata DIY menyampaikan bahwa implementasi Perda Ripparda saat ini tengah memasuki pada tahap ketiga. Tahap ketiga sendiri dijelaskan Singgih mulai pada tahun 2020-2025 dengan tujuan mewujudkan tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan ramah lingkungan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memperkuat Kelembagaan yang ada di Destinasi Wisata ini maka Dinas Pariwisata DIY telah membuat langkah kebijakan dengan membuat Peraturan Gubernur yang mengatur tentang kelembagaan di Destinasi wisata dan desa/ desa/kampung wisata. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan desa/kampung wisata juga di destinasi wisata. Peraturan Gubernur yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur No 40 Tahun 2020 Tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata. Peraturan ini dibuat dalam rangka penerapan pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu adanya pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata, pengaturan peran masyarakat dalam bentuk kelompok sadar wisata dan desa/kampung wisata bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Regulasi kebijakan ini juga merupakan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pengembangan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 disebutkan bahwa strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan meliputi pengembangan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi

yang dikembangkan oleh masyarakat lokal. Aturan desa wisata sudah ada di Pergub (Peraturan Gubernur) yang mengatur mulai dari pembentukan dan langkah untuk memperkuat kelembagaan wisata. banyak masyarakat yang masih belum memahami Pokdarwis, pengelolaan wisata perlu diperbaiki begitupula dengan data dari ketenagakerjaan. Standardisasi di beberapa desa wisata sudah memenuhi, namun beberapa lainnya masih membutuhkan dukungan dan pelatihan. Sekarang masih banyak desa wisata yang per-padukuhan, bukan perorangan. Desa wisata ini penting agar desa wisata bisa menjadi sebuah *living museum* agar menjadi daya tarik tingkat nasional”.

Dinas Pariwisata DIY dengan alokasi anggaran untuk atraksi daya tarik wisata dan pembangunan infrastruktur kawasan pariwisata hanya dapat sukses mendulang devisa apabila ditunjang perilaku dan kesadaran masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah bagi wisatawan. Tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan menjadi faktor penentu dari kedatangan para wisatawan.

Peran Sebagai Pengusaha

Pembangunan pariwisata umumnya dilakukan oleh sektor swasta terutama pembangunan fasilitas dan jasa pariwisata. Namun, pengadaan infrastruktur umum seperti jalan, listrik dan air yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata terutama untuk proyek-proyek yang berskala besar yang memerlukan dana yang sangat besar seperti pembangunan bandar udara, jalan untuk transportasi darat, proyek penyediaan air bersih, dan proyek pembuangan limbah merupakan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai penjamin dan pengawas para investor yang menanamkan modalnya dalam bidang pembangunan pariwisata. (LAKIP DISPAR DIY, 2020)

- a) Keberadaan Bandara Udara Yogyakarta Internasional Airport (YIA), dengan adanya keberadaan bandara yang bertaraf internasional ini diharapkan dapat memperkuat aksesibilitas terutama untuk wisatawan mancanegara.
- b) Akselerasi interkoneksi Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) yang diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antarwilayah. Pengembangan kawasan pariwisata apalagi terkoneksi dengan Yogyakarta International Airport.
- c) Sinergi dengan keterpaduan pengembangan kepariwisataan regional jogja-solo-semarang (joglosemar). Penetapan Borobudur sebagai salah satu dari 10 (sepuluh) destinasi wisata prioritas pariwisata membawa dampak bagi daerah-daerah sekitarnya.

- d) Rencana pembangunan trans jalur tol jogja-solo-bawen yang dapat memberikan peningkatan mobilitas pengguna jalan yang masuk DIY maupun yang keluar DIY.
- e) Sinergi dan keterpaduan pengembangan infrastruktur, terkait pengembangan jalur Bedah Menoreh, mulai dari kawasan Bandara Udara NYIA hingga kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan terhubung ke Borobudur, Magelang, Jawa Tengah.
- f) Strategi komunikasi pemasaran belum tepenuhi optimal (pemerintah dan swasta masih melakukan sendiri-sendiri).

Point-point tersebut di atas merupakan upaya dari Pemerintah dalam rangka mendukung kunjungan wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan membangun infrastruktur, pengelolaan destinasi wisata dan promosi merupakan usaha pemerintah untuk memajukan wisata. hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY dengan alokasi anggaran untuk atraksi daya tarik wisata dan pembangunan infrastruktur kawasan pariwisata hanya dapat sukses mendulang devisa apabila ditunjang perilaku dan kesadaran masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah bagi wisatawan. Tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan menjadi faktor penentu dari kedatangan para wisatawan.

Pembangunan infrastruktur ini memang tidak dikerjakan oleh Dinas Pariwisata DIY melainkan oleh Instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas PU ESDM dengan usulan dari masyarakat setempat maupun hasil dari koordinasi lintas OPD, dan investor dalam pembangunan jalan tol dan bandara internasional itu semua untuk mendukung pembangunan kepariwisataan DIY dan masyarakat dapat memanfaatkannya, pemerintah pun mendapatkan keuntungan dari pembangunan infrastruktur yang dibangun.

Pembangunan destinasi wisata dan penataan kawasan wisata terus dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY sarana dan prasarana wisata terus ditingkatkan seperti pembuatan fasilitas umum di destinasi wisata dan desa wisata sehingga diharapkan dengan banyaknya fasilitas yang dibangun bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar destinasi wisata seperti pembangunan kios souvenir fasilitas foodcourt, panggung kesenian, tempat parkir dan toilet untuk dimanfaatkan bersama.

Pemda DIY harus menguatkan sinergitasnya untuk meningkatkan kualitas industri yang terkait dengan pariwisata. Seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi

dan UMKM, serta Dinas Pariwisata harus dapat menggali potensi daerah. Perlunya aturan yang mendukung UMKM sekitar juga perlu didorong agar nilai lokal DIY tetap terjaga dan produk lokal pada dasarnya memiliki kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Hanya tinggal bagaimana di Disperindag serta Dinas Koperasi UMKM bersinergi untuk membina pelaku UMKM, kemudian Disperindag memberikan hak paten produksi. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang telah di rancang oleh Dinas Pariwisata DIY dalam RIPPDA DIY serta dalam Renstra. Pembangunan fasilitas lainnya oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY berupa promosi yang dilakukan melalui media elektronik maupun media sosial yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata seperti Website Vistingjogja, Cannel Youtube, Instagram dapat mendatangkan kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dampak dari kegiatan promosi ini adalah adanya devisa negara yang masuk bahkan diharapkan juga investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Yogyakarta. Pemberian fasilitas ini untuk memberikan gairah kepada pelaku pariwisata dan tentu saja diharapkan juga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dengan meningkatnya PAD dari sektor pariwisata. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Peran Stimulan atau Pendorong

Peran Pemerintah dalam upaya memberikan stimulasi atau rangsangan bagi masyarakat dengan memberikan dana atau hibah kepada masyarakat. Bantuan dana dalam rangka mendukung kegiatan promosi dan pemasaran suatu daya tarik atau destinasi wisata yang merupakan peran stimulasi pemerintah ke masyarakat. Hal ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun nusantara antara lain dengan meningkatkan event-event yang ada beberapa dari event-event itu Dinas Pariwisata memberikan fasilitasi kepada komunitas maupun kepada desa/kampung wisata dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan, misalnya : pemberian fasilitasi pada kegiatan lomba burung perkutut, lomba burung berkicau, lomba pacuan kuda dan pemberian fasilitasi di desa/kampung wisata seperti festival kuliner, festival desa wisata dan beberapa event lainnya.

Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri pariwisata daerah yaitu penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan. Pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana wisata

diupayakan agar dapat membangkitkan pariwisata di DIY dan juga sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di destinasi wisata dan meningkatkan jiwa wirausaha, jadi masyarakat bukan hanya sebagai penonton namun sebagai pelaku usaha di bidang pariwisata, misalnya memiliki homestay, sebagai guide, rumah makan dan toko souvenir. sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di destinasi wisata dan meningkatkan jiwa wirausaha, jadi masyarakat bukan hanya sebagai penonton namun sebagai pelaku usaha di bidang pariwisata, misalnya memiliki homestay, sebagai guide, rumah makan dan toko souvenir.

Selain pembangunan sarana prasarana Dinas Pariwisata DIY juga memberikan fasilitasi berupa dana untuk mendukung kegiatan budaya di desa/kampung wisata seperti kegiatan merti desa, Festival jathilan, gelar potensi desa/kampung wisata, untuk mendukung UMKM maka Dinas Pariwisata juga mengadakan kegiatan seperti Jogja Fashion Week, Jogja Batik Carnival, pameran pariwisata baik di dalam dan di luar negeri dengan mangajak pelaku usaha UMKM mulai dari batik, kerajinan tangan dan juga industri makanan tradisional . Hal ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan juga mereka dapat menikmati adanya kegiatan wisata di Yogyakarta.

Dengan adanya pemberian stimulasi dari Dinas Pariwisata Daerah, maka jika stimulant dipergunakan sesuai dengan peruntukan dan program kerja yang telah dibuat. Dari beberapa desa wisata yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah ada dua desa yang menonjol bahkan sudah menjadi desa wisata yang mandiri, dapat mensejahterakan masyarakatnya, menciptakan lapangan kerja yaitu Desa Wisata Pentingsari di Sleman dan Desa Wisata Nglanggeran di Gunungkidul. Perencanaan yang matang dan pengelolaan yang baik sudah di laksanakan di kedua desa wisata tersebut, sehingga bantuan yang di berikan oleh mereka dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya.

Peran Sebagai Pariwisata Sosial

Dalam Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2009 disebutkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, global. Kepariwisata berfungsi

memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi dalam kegiatan ini, kegiatan kepariwisataan ini juga merupakan salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dan membuka peluang usaha. Untuk menjalankan itu semua maka Dinas Pariwisata DIY mendirikan POKDARWIS (KELOMPOK SADAR WISATA).

Secara umum, fungsi dari Kelompok Sadar Wisata atau POKDARWIS adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata
- b. Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/Kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah.

Untuk meningkatkan kelas desa/kampung wisata maka Dinas Pariwisata DIY mengadakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/kampung Wisata Kegiatan ini dilakukan di 16 titik dari 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan narasumber kegiatan sosialisasi terdiri dari Komisi B, akademisi dan Dinas Pariwisata DIY. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 ini disusun untuk menjadi panduan bagi kelembagaan POKDARWIS dan desa/kampung wisata di DIY. Dinas Pariwisata DIY berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Destinasi Wisata dan desa/kampung wisata dengan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Dinas Pariwisata DIY dalam melakukan peran ini dituangkan dalam program kegiatan penyuluhan dan pendampingan di destinasi dan di desa/kampung wisata serta membentuk kelembagaan pariwisata yaitu Kelompok Sadar Wisata.

Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata DIY berupa penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM di destinasi dan desa/kampung wisata akan di sertifikasi dengan tujuan agar mereka memiliki daya saing dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yaitu berupa sertifikasi pemandu sejarah dan sertifikasi tour planner, pelatihan SDM di homestay desa mandiri budaya contoh pelatihan adalah pelatihan kuliner dan higienitas sajian kuliner di destinasi wisata, pelatihan pemandu wisata alam, pemandu wisata buatan, dan pemandu wisata budaya.. Pembangunan fasilitas pendukung ini dimaksudkan sebagai sarana penambahan

fasilitas di desa/kampung wisata sehingga kan menambah asri lingkungan dan sarana dan prasarana ini merupakan hibah yang di berikan oleh Dinas Pariwisata DIY dalam rangka mendukung kegiatan kepariwisataan yang dilakukan oleh masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya, masyarakat yang tidak mempunyai modalpun diharapkan dapat menikmati fasilitas ini untuk mengembangkan usahanya dengan memiliki usaha berupa industri kecil seperti pembuatan makanan khas daerah setempat Dari kawasan gunung api purba nan eksotis di Patuk, Gunungkidul, lahir tangan-tangan berdedikasi pemelihara anugerah alam. Berawal dari kebutuhan menyediakan penganan untuk menjamu wisatawan, warga setempat bergerak bersama menyajikan buah tangan khas yang dapat dinikmati dan dibawa pulang oleh para pejalan.

Peran Sebagai Daya Tarik Publik

Peran yang dilaksanakan pemerintah daerah adalah peran mendorong kelompok non tourism turut serta untuk memahami pariwisata, karena pariwisata merupakan multi disiplin atau melibatkan beberapa stakeholder di destinasi wisata. Dinas Pariwisata DIY dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Kepariwisata dan undang-undang keistimewaan membentuk Saka Pramuka dengan tujuan anggota Pramuka Satuan Karya (Saka) Pariwisata diminta ikut membantu promosi pariwisata di daerah dan kampanye Sapta Pesona Sadar Wisata khususnya di kalangan generasi muda dan anggota pramuka pada umumnya. Sebagai kelompok masyarakat non tourism di DIY keberadaanya sangat diharapkan sangat diperlukan oleh Pemerintah daerah untuk membantu berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY. Penyelenggaraan kepariwisataan bagi pramuka siaga dan pramuka penggalang ditekankan terutama untuk mengembangkan minat mereka di bidang kepariwisataan dengan penerapan sistem pencapaian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) penyelenggaraan kepariwisataan bagi pramuka, penegak dan pandega dimaksudkan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya di masa datang. Kegiatan Saka Pariwisata adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan bakat dan minat para anggotanya di bidang kepariwisataan secara lebih intensif dan terarah meliputi pokok-pokok kegiatan untuk: Saka Pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta di bentuk di setiap kabupaten/kota dengan kegiatan yang sama dan Saka Pramuka ini diharapkan dapat menjadi garda depan pelaksanaan kampanye Sadar Wisata dengan menerapkan Sapta Pesona. Kegiatan ini memang non profit dan bersifat sosial dalam rangka juga membantu pemerintah daerah dalam mempromosikan wisata kepada khalayak ramai. Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata DIY

memberikan kesempatan bagi masyarakat non tourism untuk membantu pemerintah dalam menggalakkan kampanye Sadar wisata dan mempromosikan pariwisata di DIY, seperti yang dilakukan oleh komunitas Camper Van Indonesia (CVI) terbukti bahwa apa yang dilakukan Dinas Pariwisata DIY mendapatkan apresiasi dari komunitas yang bergerak bukan di bidang kepariwisataan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: Dinas Pariwisata DIY sebagai salah satu pemangku kepentingan atau stakeholder di bidang pariwisata telah melaksanakan tugas dan perannya dalam membangun pariwisata DIY baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata DIY dalam melakukan tugasnya selalu berkoordinasi dengan OPD terkait, stakeholder pariwisata dan juga komunitas masyarakat yang peduli dengan pembangunan pariwisata di DIY. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan Forum Komunikasi antar OPD, Koordinasi Kegiatan event-event pariwisata yang di laksanakan oleh Dinas Pariwisata dengan stakeholder pariwisata dan juga dengan forum desa wisata. Peran Pemerintah sebagai perencana sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan proses yang sudah mengacu kepada peraturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang. Meski ada dalam prosesnya terjadi perbedaan antar bidang dan kurang pahami pejabat yang membidangi bidang perencanaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Dokumen Perencanaan Daerah (DPA) yang sudah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Peran Pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau peraturan perundang-undang juga sudah dilaksanakan dengan membuat Peraturan Daerah tentang RIPPDA DIY dan Peraturan Gubernur tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung wisata. Sebagai upaya melaksanakan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kelompok Sadar Wisata dan Desa/Kampung Wisata.

Peran Pemerintah sebagai pengusaha yang dilakukan adalah membangun sarana infrastruktur meskipun peran ini bukan dijalankan sendiri oleh Dinas Pariwisata namun berkoordinasi dengan Instansi terkait yaitu Dinas PU ESDM DIY dan Juga Dinas Perhubungan. Peran sebagai pengusaha yang dilakukan membangun sarana dan prasarana dengan

membangun fasilitas umum dan kemudian pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat setempat di mana obyek wisata itu berada sebagai sarana bagi kegiatan masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah akan mendapatkan income berupa peningkatan PAD. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan sarana prasarana fisik berupa toilet, tempat parkir, area kuliner, papan petunjuk nama, sedangkan non fisik berupa media promosi yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri serta fasilitasi kegiatan pasar wisata yang juga dilaksanakan oleh asosiasi di bidang perjalanan wisata. Mendorong minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi maka DINas memberikan stimulasi berupa hibah berupa bangunan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan fasilitas di Destinasi wisata sehingga membuat semakin indah dan tertata. Untuk pembangunan non fisik pemerintah dalam hal ini DINas Pariwisata memberikan fasilitasi bantuan kegiatan masyarakat untuk kegiatan kesenian yang dilaksanakan di Desa/Kampung wisata, pelaksanaan event-event melalui pameran baik dalam dan luar negeri dengan membawa hasil UMKM. Peningkatan SDM dan Kelembagaan Pariwisata agar Desa/Kampung wisata dapat naik kelas. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata DIY berupa pendampingan penguatan kelembagaan dan SDM, melakukan sertifikasi untuk SDM pariwisata di desa/kampung wisata, melakukan sertifikasi untuk Usaha Jasa Pariwisata untuk menjamin pelayanan yang prima bagi wisatawan.

Penulis mencoba untuk memberikan saran: Bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan sudah berjalan dengan baik, namun dalam proses perencanaan masih banyak terjadi beberapa persepsi dalam proses. Ada Yang melalui proses evaluasi dulu, ada yang hanya mengcopy paste kegiatan yang lalu dengan mengurangi dan menambah target dan keluarannya saja., sehingga terkesan kegiatan yang dilakukan terkesan hanya itu-itu saja. Dinas Pariwisata DIY sebagai salah satu stakeholder sebaiknya terus melakukan kegiatan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan dengan melakukan pendampingan yang terus menerus tidak hanya berhenti setelah melakukan kegiatan pelatihan tidak ada lagi evaluasi, juga pembangunan sarana dan prasarana umum tidak hanya dibangun di obyek wisata yang sudah cukup dikenal, namun juga terus menggali potensi wisata yang lain. Dinas Pariwisata DIY sebaiknya terus melakukan pendampingan yang intensif terhadap desa/kampung wisata yang belum juga naik kelas dengan terus melakukan pelatihan dan memberikan semangat bagi mereka untuk terus melanjutkan kegiatan pariwisata di daerahnya. Dinas Pariwisata DIY terus mendorong masyarakat non tourism untuk turut berpartisipasi dalam mempromosikan pariwisata di DIY, hal ini akan memperingan tugas Dinas Pariwisata jika banyak komunitas

yang turut bergerak. Peningkatan promosi wisata untuk obyek wisata yang belum dikenal oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, ‘‘Pokok-pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional’’ diakses pada www.bappenas.go.id/info-2019 diakses pada tanggal 1 Desember 2020 pukul 20.00 WIB
- Bungin, Burhan, 2007, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana
- Dewi, Rahayu Kusuma, 2016, Studi Analisis Kebijakan Publik, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- E. Parlemen, DInas Parwisata DIY Jelaskan Implementasi Perda Ripparda DIY diakses dalam dpr.go.id, pada 16 Januari 2022
- Hakim, Lukman, Industri Pariwisata dan Pembangunan Nasional, Jurnal Among Makarti Vol 3 No.5 Juli 2010, hal. 70-78.
- Herlambang Jati Kusumo, Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Mulai Berjalan dalam harianjogja.com. diakses pada tanggal 12 Desember 2020 pukul 18.45 WIB.
- Hermawan, D dan G. Pratidina, Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bogor, *Jurnal Sosial Humaniora* ISSN 2087-4928 Volume 6 Nomor 2, Oktober 2015, hal.94-103.
- Idris, Magfirah T, Nurul Umi Ati dan Agus Zainal Abidin, Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Kampung Jodipan Dan Kampung Tridi (studi kasus di Kelurahan Jodipan dan Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing Kota Malang), Jurnal Respon Publik, Volume 14 No. 4 tahun 2019, hal. 68-77).
- Irawanam Eri, Implemasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, Jurnal Jejaring Adminsitasi Publik Th. VII, Nomor 2, Juli – Desember 2015.
- Judisseno, Rimsky K, 2017, Efektivitas Dan Kompleksitas Kepariwisataaan, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Junaid, Ilham, Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Kebijakan Dan Perencanaan Pariwisata, Jurnal Kepariwisataaan, Volume 10, No. 02 Agustus 2016, halaman 50-68.
- Kasih Cakaputra Komsary, ‘‘Pilar Pembangunan Kepariwisataaan Indonesia’’ diakses pada tourism.binus.ac.id/2017/20/4 diakses pada tanggal 13 Desember 2021pukul 12.39 WIB
- Keputusan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- [mediaindonesia](http://mediaindonesia.com),pariwisata-tekan-angka-kemiskinan,diaksesdalam mediaindonesia.com/nusantara, pada tanggal 16 Januari 2022.

- Moeleong, J. Lexi, 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, iwan, 2019, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nugroho, riant, 2014, kebijakan public di Negara-Negara Berkembang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nyoman Sunarta dan Nyoman Sukma Arida, 2017, Pariwisata Berkelanjutan Bali: Cakra Press.
- Oka A. Yoeti, 1996, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung: Angkasa
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025.
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2025.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020 - 2024
- Qodriyatun, Sri Nurhayati Q, Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa, Jurnal Masalah-Masalah Sosial Vol.9, No. 2, Desember 2018.
- Raharjo, Mudjo, Prof, Dr, Materi Kuliah Penelitian PPs, Universitas Maliki Malang, Juni, 2011
- Sentanu, I Gede Eko Putra Sri dan Mahadiansar, Memperkuat Peran Pemerintah Daerah: Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan, Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol. 8 No. 1 Juni 2020, hal. 1-20.
- Simamora, Rohan Kristin dan Rudi Salam Sinaga, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik UMA 4 (1), (2016), hal. 79-90.
- Suparmoko, Muhammad, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol.9 No. 1 April 2020, hal. 39-50.
- Soekmato, Soerjono, 2010, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Syakdiah, DInamika Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Prosiding Seminra dan Call Paper 20-21 Oktober 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammdiyah Sudoarjo, Sidoarjo – Indonesia.
- Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Winarno, budi, 2013, Etika Pembangunan, Jakarta:Pt. Buku Seru